

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang pustaka atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian khususnya yang membahas tentang banjir dan partisipasi. Adapun pustaka yang dibahas terdiri dari definisi banjir, pencegahan banjir, program pencegahan banjir, partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi dan penelitian terdahulu. Dari bab ini diperoleh sintesa pustaka dimana hasil sintesa pustaka ini berupa variabel program banjir dan variabel tingkat partisipasi yang akan di gunakan pada tahap analisis.

2.1 Banjir

2.1.1 Bencana Banjir

Banjir adalah sebuah insiden tergenangnya suatu daerah dampak air yang mana meluap melebihi kapasitas pembuangan air di suatu daerah dimana peristiwa ini bisa dikatakan menjadi ancaman musiman (Rahayu, 2009). Banjir ditimbulkan sebab curah hujan tinggi serta disertai penggunaan drainase yang tidak mampu menampung intensitas hujan (Situmorang, 2013). Air hujan yg mengalir di tanah bisanya sebagian akbar terserap oleh tanah, sebagian dialirkan serta sebagian lainnya menguap (Situmorang, 2013). Air yg tidak masuk kedalam tanah (infiltrasi) dan tidak mengalir maka air hujan sebagai permasalahan yang dapat menimbulkan genangan serta banjir (Situmorang, 2013).

2.2 Pencegahan Banjir

Pencegahan banjir adalah pengadaan upaya untuk mengalirkan kelebihan limpasan air banjir ke wilayah lain untuk meminimalisir terganggunya masyarakat. Menurut Hadimulyono (2005) telah mendefinisikan bahwa pencegahan banjir sebagai tindakan yang menyeluruh melalui metode struktur dan non struktur. Menurut Kodoatie (2013) pencegahan banjir merupakan bentuk pengelolaan sumber daya air yang berfungsi sebagai pengontrol banjir.

Pencegahan banjir terbagi menjadi 2, yaitu mencakup struktur dan non struktur (CIFR (2002) dalam Novan (2013)). Metode struktural adalah dilakukan

dengan melakukan kegiatan rekayasa teknis seperti penyediaan sarana dan prasarana banjir sedangkan metode non struktural dilakukan dengan cara pemanfaatan ruang. Menurut Kodoatie (2013) Pencegahan banjir meliputi pencegahan banjir struktur dan pencegahan banjir non struktur yang mana adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Banjir Struktur

Metode struktur merupakan metode sistem pencegahan yang menggunakan bangunan pengendali untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam perlindungan air, konstruksi dan pemeliharaan dapat dilakukan sesuai dengan konstruksi bangunan pelindung air dan sungai. Metode *waterproofing* adalah sebagai berikut yaitu :

a. Bendungan atau Dam, yang mana merupakan bangunan tanah yang berguna untuk menampung/menahan air, lumpur dan limbah tambang (*tailing*) (Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2010).

b. Kolam retensi (*retention basin*), dilakukan sebagai bentuk pengaturan drainase untuk mengurangi puncak banjir. *Retention* berarti Kolam pengatur, jadi kolam ini menyimpan air sungai sehingga berperan dalam mengurangi banjir. Penurunan muka air banjir ini dipengaruhi oleh karakteristik hidrograf banjir, volume tambak, dan dinamika beberapa bangunan. Selain kolam pengendali, proteksi banjir juga dapat diterapkan pada kolam pengendali dan kolam pengendapan. *Detension Basin* adalah suatu cara penyimpanan air di suatu cekungan pada saat banjir, dan setelah hujan, air tersebut dibuang ke sungai/saluran yang menyatu dengan air kering dari kolam. *Retarding Basin* adalah metode penyimpanan air untuk memperlambat (menunda) aliran air ke sungai pada saat banjir. Dengan cara ini, banjir sungai dapat dikurangi.

c. Pembuatan *check dam* (penangkap sedimen) yang mana *check dam* adalah bangunan kecil yang dibangun melintasi saluran/sungai, yang tujuannya untuk mengurangi kemiringan alur sungai di sepanjang sungai, sehingga mengurangi kecepatan air dan erosi. *Check dam* membentuk sedimen di depan bangunan yang dapat memungkinkan bangunan untuk menentukan stabilitas aliran atau sungai.

- d. Bangunan pengurang sedimen sungai, dapat berupa tebing atau jeram yang dirancang untuk memperlambat pergerakan air dan mencegah limpasan dari bendung atau dermaga yang terletak di hilir. Saat banjir, aliran air yang tidak terkendali dapat merusak fondasi bangunan di lereng dan penyangga, menyapu dasar sungai dan menghancurkan tepian sungai. Oleh karena itu, penurunan dasar sungai dapat dihindari dengan pengadaan *ground sill*.
- e. Pembuatan Polder yang mana berupa sebidang tanah rendah dikelilingi oleh tanah timbunan (urugan) atau tanggul pasangan beton/batu kali yang membentuk kesatuan hidrologis buatan. Tidak ada kontak dengan air selain yang dialirkan melalui saluran buatan pada daerah polder. Fungsi polder yaitu dapat menampung aliran banjir sementara ketika sungai/saluran tidak dapat mengalir ke hilir karena pada sungai tersebut terjadi banjir atau air pasang laut. Ketika polder penuh maka terdapat pipa untuk mengeluarkan air sehingga daerah yang dilindungi tidak mengalami banjir.
- Sedangkan metode struktur berdasarkan perbaikan atau pengaturan sistem sungai mencakup
- a. *River Improvement*, perbaikan jaringan sungai untuk mengurangi risiko banjir. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas drainase sungai untuk memastikan bahwa air banjir dibuang ke hilir/ke laut, sehingga menghindari limpasan.
 - b. Pembuatan saluran (*floodway*) dilakukan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh air di sungai untuk mengurangi aliran banjir. Dalam kondisi normal, sungai mengalir melalui kota-kota yang menyebabkan banjir. Aspek rekayasa dan non-teknis harus diperhitungkan selama proses banjir. Sebelum masuk ke daerah yang dilindungi atau dibuang ke laut, banjir akan dialirkan melalui *floodway*. Jika berada di daerah kepadatan rendah maka Alur *Floodway* dapat lebih mudah dibangun dibandingkan alur *floodway* di daerah kepadatan tinggi.
 - c. Pengadaan sistem drainase khusus untuk memindahkan genangan air yang terdapat pada daerah rawan banjir.

d. Sudetan (*By pass*), kanal yang berfungsi untuk mengalihkan seluruh atau sebagian limpasan banjir guna mengurangi limpasan banjir di suatu wilayah tertentu. Biasanya perbaikan alur sungai termasuk perbaikan *alignment* melalui pekerjaan sudetan. Drainase harus disediakan sebagai hal yang biasa di dasar sungai yang berkelok-kelok, yang sangat penting untuk aliran sungai dan dapat mempercepat banjir di hilir. Oleh karena itu, konsumsi mungkin memiliki konsekuensi negatif lainnya.

2. Pencegahan Banjir Metode Non Struktur

Pencegahan banjir metode non struktur dapat dilakukan dalam beberapa langkah yaitu :

- a. Pengelolaan Daerah Sungai untuk mengurangi limpasan air hujan
- b. Pengendalian erosi DAS yang dapat dilakukan untuk mencegah laju erosi. DAS yang tinggi memerlukan pengelolaan yang tepat. Pengelolaan tanah meliputi sistem pengelolaan, pola dan jenis vegetasi dalam kaitannya dengan jenis tanah, potensi tanah, elevasi dan kemiringan. Tanah longsor mengontrol aliran sedimen dan mempercepat sedimentasi sungai, terutama di hilir. Dengan adanya sedimentasi di sungai akan merubah penampang sungai dan memperkecil kapasitas pengaliran sungai. Sejumlah tindakan pengendalian erosi telah dilakukan di daerah tangkapan air yang mana adalah terasering, strip penyangga (*buffer line*), rotasi tanaman (perubahan pola tanaman), tutupan lahan (penutupan lahan melalui penanaman padat), larangan penambangan, dan deforestasi.
- c. Mengontrol peraturan penggunaan lahan terkait pengembangan daerah genangan guna menentukan tipe pengembangan sesuai dengan resiko dan kerusakan yang timbul akibat banjir. Pengembangan dilakukan dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan agar diperoleh keputusan yang bijaksana.
- d. *Law Enforcement* atau Penegakan hukum adalah proses penegakan norma hukum atau sebenarnya menjadi pedoman perilaku jalan atau gerakan hukum dalam kehidupan publik dan sosial. Penegakan hukum dapat

melakukan ini dengan menghukum penjahat dan juga jika kejahatan membahayakan orang.

- e. Sistem peringatan dan ramalan banjir yang merupakan bagian dari penanganan sistem sungai. Dalam penyusunan sistem peringatan dini atau peramalan perlu memperhatikan bangunan pengendalian banjir, operasional bangunan sistem pengendalian banjir, hidrologi, karakteristik DAS, karakteristik daerah rawan banjir, kemungkinan kerugian akibat banjir, waktu perambatan banjir dan *flood warning system*.
- f. Rencana gerakan siap siaga darurat banjir. Penanggulangan banjir perlu dilakukan untuk menangani banjir dalam keadaan darurat. Hal ini terutama untuk menangani banjir tahunan yang perlu penanganan tahunan pada waktu musim hujan atau banjir. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perencanaan penanggulangan banjir perlu dibuat terlebih dahulu seperti identifikasi masalah, penyediaan bahan dan tenaga dan ketersediaan tenaga penanggulangan.
- g. Pengaturan tata guna lahan, sesuai dengan rencana pola tata ruang yang ada guna menghindari penggunaan lahan yang tidak terkendali, sehingga mengakibatkan kerusakan DAS yang merupakan Daerah Tangkapan Air (DTA). Daerah atas dari daerah aliran sungai yang merupakan daerah penyangga, berfungsi sebagai *recharge* atau pengisian kembali air tanah, sehingga perlu diperhatikan luasan masing-masing kawasan. Misalnya untuk luasan kawasan hutan minimum 30% dari luas daerah aliran sungai.
- h. Penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat harus mempunyai sikap yang peduli akan pencegahan terhadap bahaya banjir. Selain itu pihak yang berwenang termasuk instansi yang terkait, harus dapat melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada masyarakat terkait banjir dengan cara melakukan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, pengembangan sikap masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak aktivitas di daerah sungai.

T. Tingsanchali (2012) juga berpendapat bahwa salah satu metode pencegahan banjir yaitu melalui metode struktural dan non struktural. Menurutnya pada metode struktural, dilakukan kegiatan normalisasi sungai, pembangunan bendungan ataupun melalui pembangunan tanggul sungai. Sedangkan pada metode non struktural dapat dilakukan melalui kegiatan prakiraan dan peringatan banjir, partisipasi publik, serta kelembagaan yang terdapat di masyarakat. Paimin (2009) mengemukakan bahwa penanganan atau pengendalian banjir harus dilakukan secara komperhensif terutama pada daerah yang merupakan wilayah rawan banjir, serta wilayah yang merupakan pemasok air pada saat terjadinya bencana banjir. Bentuk pencegahan yang dilakukan yaitu pembuatan waduk, pembuatan larangan penggunaan lahan pada daerah bantaran sungai serta larangan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada sungai ataupun jaringan drainase.

2.3 Program Pencegahan Banjir

Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (2012), Program adalah serangkaian kegiatan yang realistis, sistematis dan kompleks yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sarana tertentu. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai program kerja.

Menurut Santosa dalam Soesanto (2011) Program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan organisasi, didistribusikan, terintegrasi, sistematis dan disusun selama periode yang ditentukan oleh organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi.

Program yang telah dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan umum adalah program pencegahan banjir yang mencakup normalisasi sungai, pembangunan gorong-gorong, peningkatan gorong-gorong dan drainase, program penyusunan peraturan daerah, kolaborasi dan koordinasi para pihak, desiminasi informasi bencana prioritas, program penyediaan sistem informasi, penyusunan rencana kontijensi, program kesiapsiagaan bencana, pembentukan sistem peringatan dini banjir dan pembentukan forum pencegahan banjir.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut Andriani (2019), partisipasi adalah gagasan keikutsertaan setiap orang dalam hubungan, yang dapat berpartisipasi dengan berada dalam suatu kelompok atau kelompok, melalui banyak cara penting ini penting, bimbingan, alasan, keadilan, ketaatan dan tanggung jawab. Partisipasi masyarakat menurut Theresia *et All* (2015) ialah keikutsertaan warga dalam proses mengidentifikasi masalah dan peluang dalam masyarakat, memilih dan memutuskan solusi untuk memecahkan masalah, mengerjakan masalah dan partisipasi warga dalam proses mengevaluasi perubahan yang akan terjadi. Mikkelsen (2011) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

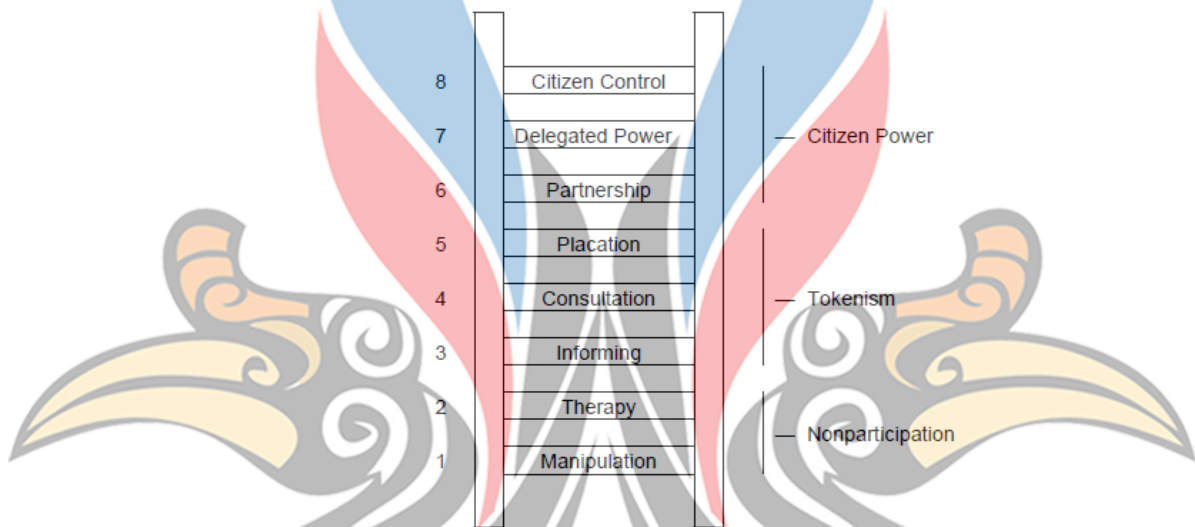
- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat untuk proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah pemekaan masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan.
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial

Berdasarkan para tiga ahli yang menyampaikan definisi partisipasi di atas, bisa didesain kesimpulan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari seseorang dan sekelompok orang secara sadar buat berkontribusi secara sukarela dalam acara pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, aplikasi, monitoring hingga di termin penilaian.

2.4.1 Tingkat Partisipasi

Menurut Arnstein dalam Hutahayan (2019) terdapat 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan.

Berdasarkan tipologi menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Sumber : Arnstein dalam Hutahayan (2019)

- Tidak Punya Peran yang meliputi Manipulasi dan Penyembuhan.
- Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan yang meliputi pemberitahuan, konsultasi dan penentraman.
- Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan yang meliputi kemitraan, pendelegasian kekuasaan and kontrol masyarakat.

Tingkat partisipasi rakyat dalam pembangunan menurut Arnstein dibagi sebagai 8 tipologi berdasarkan Arnstein dalam Anak Agung (2019) yaitu *manipulation* atau manipulasi, penyembuhan, hadiah berita, konsultasi, perujukan, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, citizen control atau rakyat yg mengontrol. Delapan tipologi tadi dari Arnstein secara umum dikelompokkan sebagai tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Tidak ada partisipasi masyarakat yang meliputi tingkat manipulasi dan terapi
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan yang diberikan adalah yang meliputi partisipasi pada tingkat informasi, konsultasi dan perujukan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan yang meliputi kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Berdasarkan tipologi tersebut, penilaian masyarakat tentang partisipasi menurut (Riefki Rindani, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Manipulasi

Tingkat partisipasi ini merupakan tingkat paling rendah yang dianggap masyarakat jahil. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam kasus ini.

2. Terapi

Tingkat partisipasi ini adalah tingkat di mana masyarakat hanya mengetahui program tetapi tidak dapat mengomentari program selama berjalan.

3. Pemberian Informasi

Tingkat ini merupakan tingkat di mana pemerintah menginformasikan kepada publik tentang berbagai pilihan. Akan tetapi mereka yang berkuasa seringkali secara sepihak memberikan informasi kepada masyarakat tanpa umpan balik atau kesempatan untuk bernegosiasi.

4. Konsultasi

Melibatkan opini publik setelah memberikan informasi dapat menjadi langkah penting menuju partisipasi penuh. Meskipun sudah ada dialog bilateral, keberhasilannya tetap rendah karena tidak ada jaminan bahwa isu dan gagasan masyarakat akan dipertimbangkan.

5. Penentruman

Pada tingkat ini, masyarakat mulai memiliki pengaruh, tetapi sebagian lagi ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Setelah diterapkan, beberapa anggota masyarakat dapat dianggap memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai peserta dalam program yang relevan.

6. Kerjasama

Pada tingkat ini, kekuasaan dibagi dalam berbagai cara melalui kesepakatan bersama antara masyarakat dan partai yang berkuasa. Dalam hal ini, dengan kesepakatan bersama, tanggung jawab bersama dibagikan.

7. Pelimpahan Kekuasaan

Pada tingkat ini, masyarakat diberi kesempatan dominan untuk mengambil keputusan dominan tentang suatu rencana atau program tertentu. Untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang muncul, penguasa harus bernegosiasi dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan dari atas

8. Kontrol Masyarakat

Pada tataran ini, masyarakat berhak mengatur program-program yang berkaitan dengan kepentingannya. Anda memiliki wewenang dan kemampuan untuk bernegosiasi dengan pihak luar yang ingin melakukan perubahan tanpa melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, masyarakat bisa mengatur program

Adapun hasil sintesa pustaka pada subbab ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sintesa Pustaka Tingkat Partisipasi Masyarakat

Sumber	Variabel	Sub Variabel
Arnstein dalam Anak Agung (2019)	Tidak punya Peran	Manipulasi
		Terapi
	Menerima Beberapa Ketentuan	Pemberian Informasi
		Konsultasi
		Penentraman
		Kerjasama
Melakukan Kekuasaan	Pelimpahan Kekuasaan	
	Kontrol Masyarakat	
Arnstein Dalam Hutahaya (2019)	Tidak Punya Peran	Manipulasi
		Terapi
	Menerima Beberapa Ketentuan	Pemberian Informasi
		Konsultasi
		Penentraman
		Kerjasama
Melakukan Kekuasaan	Pelimpahan Kekuasaan	
	Kontrol Masyarakat	

*) Sintesa Pustaka, 2022

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis penelitian yaitu kajian pemahaman masyarakat terhadap banjir di Kelurahan Ulujmai, Jakarta yang ditulis oleh Rizkia Nurhaimi dan Sri Rahayu pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap banjir dan tindakan masyarakat dalam mengatasi banjir, partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan Di Kel. Manggala Kecamatan. Manggala Kota Makassar yang ditulis oleh Mizwar Nawawi pada tahun 2016 dengan tujuan mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam peningkatan kualitas lingkungan. dan juga Arah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Lingkungan Fisik Permukiman Kumuh yang ditulis oleh Riefki Rifandi pada tahun 2016 dengan tujuan Merumuskan arahan peningkatan partisipasi masyarakat yang tepat untuk perbaikan kualitas lingkungan fisik di permukiman kumuh Kelurahan Sukolilo Baru. Adapun terdapat beberapa faktor terkait pencegahan banjir berdasarkan penelitian terdahulu dimana subjek penelitiannya adalah sebagai berikut :

www.itk.ac.id
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Sumber	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil
Rizka Nurhaimi dan Sri Rahayu (2014)	Kajian Pemahaman Masyarakat Terhadap Banjir Di Kelurahan Ulujmai, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji pemahaman masyarakat terhadap banjir dan tindakan masyarakat dalam mengatasi banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Usia Pendapatan Status tempat Tinggal Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Deskriptif Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian Banjir dan Lama Surut menjadi parameter bahaya banjir di Kelurahan Ulujuami Responden Banyak Pendatang daripada penduduk asli Pemahaman Warga Terhadap banjir adalah 40%
Mizwar Nawawi (2016)	Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Di Kel. Manggala Kecamatan. Manggala Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, KotaMakassar dalam peningkatan kualitas lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Usia Pendapatan Status Tempat Tinggal Pendidikan Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Tabulasi Silang (Chi Square) , Deskriptif Kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor Yang mempengaruhi adalah faktor sosialisasi Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Kelurahan Manggala dapat dilakukan sosialisasi.
Riefki Rifandi (2016)	Arahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Lingkungan Fisik Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan arahan peningkatan partisipasi masyarakat yang tepat untuk perbaikan kualitas lingkungan fisik di permukiman kumuh Kelurahan Sukolilo Baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan Usia Masyarakat Keanekaragam latar belakang pendidikan masyarakat Mata Pencaharian Tingkat Penghasilan Jenis Kelamin 	<ul style="list-style-type: none"> Deskriptif Kuantitatif Delphi Triangulasi 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi masyarakat masih pada tangga ketiga yaitu pemberian informasi / sosialisasi Pada RW I, Konsultasi pada partisipasi masyarakat di RW II dan pemberian sosialisasi pada RW III

Sumber	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil
			<ul style="list-style-type: none">• Kondisi Kemauan Masyarakat• Tingkat Kepercayaan Masyarakat• Kesadaran Masyarakat• Kepadatan Bangunan• Manipulasi• Terapi• Pemberian informasi• Konsultasi• Perujukan• Kemitraan• Pelimpahan kekuasaan• Kontrol masyarakat		

*) Analisis Penulis, 2021

Berdasarkan tabel penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sejalan dengan penelitian-penelitian yang belum pernah dilakukan adalah variabel yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan banjir, rujukan, kemitraan, pemberdayaan dan pengendalian masyarakat. Kemudian, sebagai metode survei yang digunakan untuk penelitian di Kelurahan Sempaja Timur, tujuan kedua dari sasaran tentang arah partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir di desa Sempaja Timur dianalisis dengan menggunakan analisis skala partisipasi Arnstein.

2.6 Sintesa Pustaka

Berdasarkan hasil peninjauan teori diatas didapatkan bahwa sintesa pustaka pada penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sintesa Pustaka

Sasaran	Variabel	Sumber		
Program Banjir	Normalisasi sungai	Bencana Daerah Kota Samarinda (2022)		
	Pembangunan Gorong-gorong			
	Peningkatan Gorong-Gorong dan Drainase			
	Program Penyusunan Peraturan Daerah			
	Kolaborasi dan Koordinasi Para Pihak			
	Desiminasi Informasi Bencana Prioritas			
	Program Penyediaan Sistem Informasi			
	Penyusunan Rencana Kontijensi			
	Program Kesiapsiagaan Bencana			
	Pembentukan Sistem Peringatan Dini Banjir			
	Pembentukan Forum Pencegahan Banjir			
	Tingkat Partisipasi Masyarakat.		Manipulasi	Arnstein dalam Anak Agung (2019), Arnsetin dalam Hutapea (2019)
			Penyembuhan	
Pemberian informasi				
Konsultasi				
Perujukan				
	Kemitraan			

Sasaran	Variabel	Sumber
	Pelimpahan Kekuasaan	
	Kontrol Masyarakat	

Berdasarkan hasil sintesa pustaka maka didapatkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sintesa Pustaka Berdasarkan Penelitian

Sasaran	Variabel
Menganalisis Persepsi Masyarakat dalam program pencegahan banjir di Kelurahan Sempaja Timur	Normalisasi sungai
	Pembangunan Gorong-gorong
	Peningkatan Gorong-Gorong dan Drainase
	Program Penyusunan Peraturan Daerah
	Kolaborasi dan Koordinasi Para Pihak
	Desiminasi Informasi Bencana Banjir
	Program Penyediaan Sistem Informasi
	Penyusunan Rencana Kontijensi
	Kesiapsiagaan Bencana
	Pembentukan Sistem Peringatan Dini Banjir
Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam program pencegahan banjir di Kelurahan Sempaja Timur.	Pembentukan Forum Pencegahan Banjir
	Manipulasi
	Penyembuhan
	Pemberian informasi
	Konsultasi
	Perujukan
	Kemitraan
Arahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan banjir di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.	Pelimpahan Kekuasaan
	Kontrol Masyarakat
	Gabungan sasaran 1 dan 2

*) Sintesa Pustaka, 2022